

EVALUASI KINERJA ANGGARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Lestari
Iman Karyadi
Atty Erdiana

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV no 54 Surabaya
e-mail: lestari_ari10@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study are: to determine the effectiveness of the Sidoarjo regency Budget as seen from the Regional financial performance. The population in this study was planned and realized number of local budgets in Sidoarjo. The sample in this research is the realization of the budget plan and the district of Sidoarjo in 2008, 2009, 2010, 2011, and 2012. The data analysis technique used is the Qualitative Methods. The results showed that the analysis of trends in percentage (percentage trend analysis) Sidoarjo district budget growth has a tendency to rise from year to year. In addition, the ability of the local government district of Sidoarjo in maintaining and improving the success that has been achieved from period to period is good. Sidoarjo regency government in the last 5 years more mnegeluarkan immediate shopping for shopping facilities and equipment for the purposes of operational activities and to fund services.

Key words: *the effectiveness of the Sidoarjo regency Budget, the Regional financial performance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat menjadi sesuatu keharusan bagi pengambil kebijakan di daerah. Dukungan perkembangan teknologi dan informasi telah membantu pengambil kebijakan melaksanakan tugasnya secara lebih baik. Di sisi lain reformasi di segala bidang yang terus bergulir telah membuka mata masyarakat yang terus melihat baik buruknya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi sektor publik yang juga terus berkembang yang diikuti oleh tuntutan masyarakat yang melihat secara kritis baik buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Kinerja pemerintah sebagai ukuran tinggi rendahnya kualitas dan akuntabilitas pengambilan keputusan oleh pemerintah merupakan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan pemerintah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tuntutan masyarakat terus berlanjut terhadap beragam perubahan terhadap kinerja dan pengelolaan pemerintahan. Tuntutan juga dilakukan terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah dengan berbagai harapan terjadi perubahan penting dan mendasar di bidang penataan anggaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengakomodasi berbagai program kegiatan sesuai keinginan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Keterbatasan keuangan daerah mengakibatkan apartur pemerintah dalam pengalokasian anggaran harus hati-hati dan dimanfaatkan secara efisien dengan skala prioritas sehingga dicapai kinerja anggaran yang kuat dalam pembentukan tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam implementasi penggunaan anggaran, masih sering terjadi tidak tersediakannya dana untuk suatu program kegiatan tertentu yang semestinya dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Kelemahan dalam perencanaan dalam pengalokasian anggaran salah satunya ditandai dengan terdapatnya unit kerja yang kelebihan anggaran yang berakibat efisiensi menjadi rendah. Di sisi lain terdapat unit kerja yang kekurangan anggaran yang berakibat program-program kegiatan menjadi tidak efektif. Dan secara keseluruhan akan berakibat kurang optimalnya dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).

Ketepatan penggunaan anggaran akan memudahkan para aparat pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan seluruh program kegiatan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan dan pada gilirannya efektivitas dan akuntabilitas kemampuan anggaran daerah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Untuk mengurangi dampak negatif dari perencanaan anggaran maka perlu adanya pengembangan kerangka perencanaan dan evaluasi terhadap kinerja anggaran sehingga di masa mendatang kinerja anggaran menjadi semakin baik yang terhindar dari pemborosan anggaran serta kesenjangan yang lebar antara kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Pemrintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah

yang merupakan ukuran kinerja Pemerintah Daerah pada aspek keuangan daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk mengambil topik dalam penelitian ini Eavaluai Kinerja Anggaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas anggaran belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diukur dari kinerja keuangan Daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui efektivitas Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari kinerja keuangan Daerah.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Anggaran

Menurut Nafarin (2000) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Menurut Hansen dan Mowen (2009) anggaran (budget) adalah perencanaan keuangan untuk masa depan; anggaran memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara itu menurut Machintosh dan Williams (1992) mendefinisikan anggaran sebagai alat utama bagi manajer untuk menjalankan fungsi manajemen *planning, organizing, coordinating, and controlling* dengan mengacu kepada target dan strategi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan jangka perusahaan (Syakhroza, 2000)

Fungsi Anggaran

Sesuai dengan fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, fungsi anggaran juga demikian. Menurut Nafarin (2000) fungsi-fungsi anggaran :

a. Fungsi Perencanaan.

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam unit dan uang.

b. Fungsi Pelaksanaan.

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba). Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan. Sehingga tiap bagian harus melaksanakan tugasnya secara selaras, terarah, terkoordinasi sesuai dengan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan dalam anggaran.

c. Fungsi Pengawasan.

Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara: Memperbandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Jenis-Jenis Anggaran

Menurut Nafarin (2000) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang berikut :

1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari :

- a) Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Misalnya anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai 1.000 unit. Anggaran variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel.
- b) Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Misalnya penjualan direncanakan 1.000 unit, dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1.000 unit. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis.

2. Menurut cara penyusunan anggaran terdiri dari :

- a) Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
- b) Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan.

3. Menurut jangka waktu anggaran terdiri dari :

- a) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek.
 - b) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek.
4. Menurut bidangnya anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut “anggaran induk (master budget)”. Anggaran induk mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan dan anggaran triwulanan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.
- a) Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan rugi laba. Anggaran operasional antara lain terdiri dari :
 - i. Anggaran penjualan
 - ii. Anggaran biaya pabrik: anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran biaya overhead pabrik
 - iii. Anggaran beban usaha
 - iv. Anggaran laporan laba rugi
 - b) Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Antara lain terdiri dari: i. Anggaran kas ii. Anggaran piutang iii. Anggaran persediaan iv. Anggaran utang v. Anggaran neraca

Proses Pengendalian Anggaran

Menurut Mulyadi (2001) proses pengendalian anggaran dilaksanakan melalui tiga tahap utama berikut :

1. Tahap Penetapan Sasaran.
Tujuan Perusahaan kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam sasaran (goal) dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan anggarannya. Informasi akuntansi manajemen berperan dalam tahap penetapan sasaran sebagai alat pengirim peran. Proses penetapan peran para manajer dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah dirumuskan.
2. Tahap Implementasi.
Setelah sasaran ditetapkan dan ditunjuk manajer yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut, serta dialokasikan sumberdaya kepada manajer

yang diberi peran dalam mencapai sasaran anggaran, fungsi anggaran dalam perusahaan kemudian mengkonsolidasikannya ke dalam suatu anggaran komprehensif yang formal untuk disahkan oleh direksi dan pemegang saham. Tahap implementasi anggaran dilaksanakan melalui dua kegiatan penting :

- Komunikasi Anggaran. Manajer fungsi anggaran bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada para manajer jenjang menengah dan bawah.
 - Kerjasama dan Koordinasi.
3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. Sasaran anggaran tidak akan tercapai tanpa pemantauan secara terus menerus kemajuan karyawan dalam mencapai sasaran mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, kerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam anggaran, untuk menunjukkan bidang masalah dalam organisasi dan menyarankan tindakan pembetulan yang memadai bagi kinerja yang berada dibawah standar.

Fungsi Anggaran Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Otorisasi: Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi Perencanaan: Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi Pengawasan: Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi Alokasi: Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi Distribusi: Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- 6) Fungsi Stabilisasi: Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Struktur APBD

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

Sedangkan struktur APBD adalah sebagai berikut <http://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html>:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah, terdiri dari: (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (3) jasa giro; (4) pendapatan bunga; (5) tuntutan ganti rugi; (6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan; terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

2. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:

- a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
- b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Analisis rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2004: 128) yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

$$1) \quad \text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

$$2) \quad \text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapata dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat

diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Rasio efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, dengan rumus:

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut :

1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp}X_n - X_{n-1}}{\text{Rp}X_{n-1}} \times 100\%$$

Rp $X_n - X_{n-1}$ = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

Rp X_{n-1} = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

METODA PENELITIAN

Populasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah rencana dan realisasi jumlah anggaran daerah di Kabupaten Sidoarjo. Sampel dalam Penelitian ini adalah rencana dan realisasi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 dengan pertimbangan pada tahun-tahun tersebut lebih realistis untuk melihat kinerja keuangan daerah saat ini.

Jenis dan Sumber data Data

Jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder yaitu data-data yang terkait rencana dan realisasi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu data: Total APBD, Total PDRB, Rencana anggaran belanja daerah, Realisasi anggaran belanja daerah, Belanja per kelompok belanja dan jenis-jenis belanja, Besarnya alokasi anggaran belanja menurut kelompok belanja, Besarnya alokasi anggaran belanja, Target dan Realisasi penerimaan PAD, Besarnya anggaran bantuan dari pusat dan propinsi, Total belanja rutin dan Total belanja pembangunan

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Metode ini digunakan data dengan cara membandingkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan fakta yang terjadi dan untuk menjelaskan hasil perhitungan yang telah didapat.

1. Analisis Trend dalam prosentase (*trend percentage analysis*) adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. (Munawir, 2004)
2. Analisis Pertumbuhan untuk menghitung pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan rumus (Yulianti, 2009).
Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio

pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{Xn} - 1}{\text{RpXn} - 1} \times 100\%$$

Rp Xn-Xn-1 = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

Rp Xn-1 = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

3. Analisis Proporsional yaitu menghitung besarnya proporsi alokasi belanja pada masing-masing kelompok dan jenis belanja setiap tahun terhadap keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta proporsi setiap kelompok dan jenis alokasi belanja.
4. Analisis Efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
5. Rasio Efektivitas Penerimaan PAD yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah:
6. Analisis Efektivitas Belanja Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Belanja terhadap PDRB yang merupakan perbandingan belanja dengan PDRB yang dihasilkan oleh daerah:
7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan:
8. Rasio Aktifitas (RA)
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti persentase belanja investasi (belanja tidak langsung) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dalam melakukan evaluasi efektivitas anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo digunakan rasio keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja anggaran daerah.

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Rasio-rasio keuangan tersebut adalah:

A. Analisis Trend dalam prosentase (*trend percentage analysis*) :

Pertumbuhan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: Realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai kecenderungan terus naik dari tahun ke tahun. Kenaikan APBD yang terjadi tiap tahun cenderung tidak stabil. Pada tahun 2009 kenaikan APBD hanya 3,03%, pada tahun 2010 kenaikannya naik menjadi 9,76%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 21,15% dan pada tahun 2012 kenaikannya menurun menjadi 13,27%. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Kabupaten Sidoarjo selama periode 4 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 11,80%. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo secara terus menerus mengalami peningkatan tetapi secara persentase kenaikannya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sejalan dengan peningkatan realisasi, namun pada tahun 2011 ke tahun 2012 persentase mengalami penurunan.

B. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan dari hasil analisis rasio pertumbuhan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan rasio pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2009 rasio pertumbuhan mencapai 40,80 %, pada tahun 2010 mencapai 14,30 %. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing sebesar 36,38% dan 42,61 %. Pada tahun 2010 menunjukkan rasio pertumbuhan yang sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain yaitu hanya sebesar 14,30 %. Hal ini menunjukkan pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan yang sangat lambat. Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode telah menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik.

C. Analisis Proporsional

Alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dari APBD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat diuraikan berikut ini:

a. Belanja Langsung:

Proporsi belanja langsung adalah sebagai berikut: Proporsi anggaran untuk belanja pegawai rata-rata sebesar 10,90% dari jumlah anggaran belanja yang dialokasikan untuk belanja langsung. Untuk belanja barang dan jasa rata-rata sebesar 47,46% dari belanja langsung dan belanja modal sebesar 41,64%. Proporsi anggaran terbesar dari belanja langsung digunakan untuk

belanja barang dan jasa sementara belanja pegawai komposisinya paling sedikit dari total belanja langsung. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun terakhir lebih banyak mnegeluarkan anggaran belanja langsungnya untuk belanja sarana dan perlengkapan untuk keperluan kegiatan operasional dan untuk membiayai jasa-jasa.

b. **Belanja Tidak Langsung:**

Belanja tidak langsung adalah sebagai berikut: Rata-rata proporsi anggaran untuk belanja pegawai sebesar 71,59%, untuk belanja bunga sebesar 0,35%, untuk belanja hibah sebesar 7,90%, untuk belanja bantuan sosial sebesar 12,71%, untuk belanja bagi hasil sebesar 1,56%, belanja bantuan keuangan sebesar 5,58% dan untuk belanja tidak terduga sebesar 0,31%. Proporsi anggaran di atas menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran tidak langsung lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai yaitu sebesar 71,59%. Sedangkan proporsi terkecil dari belanja tidak langsung adalah untuk belanja tidak terduga sebesar 0,31% dan untuk belanja bunga yaitu sebesar 0,35%. Pada tahun 2011 dan 2012 proporsi belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk belanja bunga tidak ada atau sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai hutang sehingga tidak ada dana yang dialokasikan untuk membayar bunga.

D. Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1). **Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada tahun 2008 dan tahun 2009 rasio efektivitas menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sudah efektif yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik yang ditunjukkan dengan rasio efektivitas penerimaan PAD sebesar 100% untuk tahun 2008 dan sebesar 111,78% untuk tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 rasio efektivitas menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan masih kurang efektif yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah belum baik. Pada tahun-tahun tersebut rasio efektivitas penerimaan PAD kurang dari 100%. Pada tahun 2010 rasio aktivitas hanya mencapai 93,04%, untuk tahun 2011 mencaoi 92,20% dan tahun 2012 hanya mencapai 92,08%. Rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Sidoarjo 2008 sampai dengan 2012 sebesar 97. Rasio efektivitas dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah masih belum efektif karena nilai rasio masih di bawah 100%.

2). Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada tahun 2008 dan tahun 2009 rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dan 2009 pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja daerah secara efisien yaitu sama antara target dan realisasi. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 rasio efisiensi belanja daerah mencapai masing-masing sebesar 89%, 87%, dan 81%. Karena rasio efisiensi belanja di bawah 100% maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sudah tercapai efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang dimiliki sehingga telah tercapai penghematan anggaran. Selama periode selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, rata-rata rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 91%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan sudah mampu meminimalkan penggunaan sumber daya (anggaran belanja daerah) yang ada tetapi belum maksimal dalam penggunaan sumber anggaran yang dimiliki.

E. Analisis Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB

Efektivitas belanja daerah terhadap PDRB Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2008 rasio efektivitas belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo sebesar 296,21, pada tahun 2009 sebesar 273,61, pada tahun 2010 sebesar 266,43 dan pada tahun 2011 sebesar 282,92. Rasio efektivitas ini cenderung tidak stabil. Pada tahun 2009 naik, kemudian pada tahun 2010 turun terus tetapi pada tahun 2011 naik. Rata-rata rasio efektivitas anggaran belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 279,79. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengeluaran belanja lebih kecil daripada pendapatan.

F. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$RKKD_t > RKKD_{t-1}$, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik. $RKKD_t$ adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada periode t atau periode saat dilakukan analisis, sedangkan $RKKD_{t-1}$ adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada periode sebelumnya. Berdasarkan pada hasil analisis kemandirian daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kemandirian daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada tahun 2008 rasio kemandirian daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai 21%, pada tahun 2009 mencapai 24%, pada tahun 2010 sebesar 34% pada tahun 2011 sebesar 34% dan pada tahun 2012 mencapai 43%. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan

kemandirian daerah. Kenaikan kemandirian daerah agak lambat dari untuk tahun 2009 dan tahun 2010. Kemudian prosentasi kenaikan kemandirian daerah terus naik pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 kenaikan kemandirian daerah sangat signifikan yaitu 34% pada tahun 2011 menjadi 43% pada tahun 2012. Rasio kemandirian daerah ada kecenderungan untuk meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Tetapi besarnya kemandirian daerah masih di bawah 30%. Dari hasil analisis kemandirian daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sosial masih ada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi, dengan kata lain bahwa kemandirian daerah menunjukkan perkembangan yang baik.

G. Rasio Aktivitas

Berdasarkan pada hasil analisis rasio aktivitas dapat dijelaskan kondisi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: Belanja Langsung Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008 komposisi dana untuk belanja langsung sebesar 45%, pada tahun 2009 turun menjadi 39,56% dan tahun 2010 turun lagi menjadi 32,77%. Tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 40,36% dan 41,19%. Perkembangan belanja tidak langsung pada tahun 2008 sampai tahun 2012 terjadi kebalikan dari perkembangan belanja langsung. Dari kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo lebih memprioritaskan pada belanja tidak langsung yaitu merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Tetapi perkembangan belanja tidak langsung dari tahun ke tahun cenderung semakin turun sehingga belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah semakin meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis Trend dalam prosentase (*trend percentage analysis*) pertumbuhan APBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai kecenderungan terus naik

dari tahun ke tahun. Selain itu, kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode adalah baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun terakhir lebih banyak mengeluarkan belanja langsungnya untuk belanja sarana dan perlengkapan untuk keperluan kegiatan operasional dan untuk membiayai jasa-jasa.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus lebih memprioritaskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengingat potensi dari PAD masih sangat besar sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang dimiliki dan memaksimalkan penggunaan sumber anggaran yang dimiliki mengingat pada tahun-tahun terakhir ada kecenderungan bahwa efisiensi terus menurun. Walaupun perkembangan kemandirian daerah semakin meningkat namun pemerintah daerah harus terus meningkatkan kemandirian daerah sampai lebih dari 50 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Hansen & Mowen. 2009. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
<http://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/anggaran-pendapat-dan-belanja-daerah.html>
<http://hakimsimanjuntak.blogspot.com>
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Edisi 3 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Nafarin, M. 2000. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syakhroza, A. 2000. *Permainan Politik dalam Proses Anggaran: Sebuah Kajian Literatur*. *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia*, 12: hlm 29-33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Warsono. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Kedua. UMM.
- Yulianti. A. 2009. *Alokasi Belanja Pelayanan Publik Sektor Pendidikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi 2004-2006*. Universitas Jambi.